

**Penerapan Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Konteks Pemerintahan
Desa Di Kecamatan Muntilan Menggunakan Arsitektur Enterprise Dengan Tahapan
Dari TOGAF ADM**

ARSITEKTUR ENTERPRISE (R)

Supangat, M.Kom.,ITIL.,COBIT.



Oleh :

**Dovan Edo Aji Pratama
1461900047**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pemerintahan tingkat rendah adalah desa. Penerapan yang digunakan disini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa yang berada di kecamatan Muntilan, Magelang. Dengan melakukan penerapan tersebut, akan membawa seluruh pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tata kelola di seluruh pemerintahan desa masih perlu ditingkan agar mencapai dengan tujuan dan ketentuan mensejahterakan para warga desanya. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu dengan efisiensi dan efektivitas, inovasi, orientasi jangka panjang, keterbukaan dan tansparasi, akuntabel dan pengelolaan keuangan yang handal.

Ruang lingkup pemerintahan di desa akan menjadi semakin besar dan kompleks dengan pendekatan tradisional terhadap audit internal dan manajemen resiko yang perlu di optimalkan secara menyeluruh sehingga dapat tetap efektif. Dengan menggunakan salah satu prinsip *Enterprise Architecture* TOGAF ADM yaitu *Implementation Governance*, akan menjadi titik awal perkembangan atau peningkatan tata kelola pemerintahan desa di kecamatan Muntilan, Magelang. Penerapan secara efektif dapat memberi manfaat untuk mecapai suatu tujuan pemerintahan desa yang telah di musyawarahkan pada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka disini dilakukan untuk mendapatkan sebuah ringkasan artikel dari penulis yang dijadikan pedoman, yaitu menggunakan studi literatur. Disini juga akan dijelaskan mengenai suatu metode dasar berkaitan dengan topik yang akan dikerjakan.

Penerapan salah satu tahapan *Enterprise Architecture* TOGAF ADM yaitu menggunakan *Implementation Governance* dilakukan untuk meningkatkan dan menerapkan sebuah prinsip-prinsip pemerintahan desa di kecamatan Muntilan, Magelang. Peningkatan dan penerapan sebuah prinsip-prinsip tersebut meliputi manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan, manajemen pelayanan, manajemen kemasyarakatan, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen kewilayahan, manajemen legalisasi dan manajemen sarana prasarana. Studi literatur dilakukan untuk mendapat sebuah ringkasan artikel yang dijadikan pedoman. Studi literatur yang dimaksud meliputi penulis artikel, judul artikel, hasil dari penelitian serta persamaan dan perbedaan dari artikel yang menjadi referensi.

Artikel yang menjadi referensi disini, yaitu [1] *Implementation of C4.5 Algorithm for Analysis of Service Quality in Companies of PT. XYZ* dengan hasil penelitian (PT. Kualitas pelayanan XYZ kepada pelanggan dengan menggunakan metode C4.5, level PT. Pelayanan XYZ dapat diukur dengan jelas dan aspek ruang tunggu merupakan aspek yang paling dominan dari beberapa aspek kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. XYZ.) dan dari dalam artikel tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dari yang telah saya buat yaitu persamaanya adalah memiliki kasus yang sama-sama menggunakan implementasi untuk meningkatkan suatu pelayanan pemerintahan maupun perusahaan, perbedaan dari artikel tersebut adalah menggunakan algoritma C4.5 sedangkan disini menggunakan tahapan TOGAF ADM yaitu *Implementation Governance*.

[2] *Pertemuan Keempat – TOGAF* dengan hasil penelitian yaitu (Pengertian serta penjelasan tentang TOGAF, kelebihan dan kekurangan TOGAF, dan penjelasan dengan metode ADM) dari dalam artikel tersebut saya mengambil bagian tentang fase yang berada di TOGAF yaitu *Implementation Governance*. Dengan penerapan *Implementation Governance* di bidang pemerintahan merupakan sebuah kecocokan tersendiri dikarenakan bisa menjadi solusi dari setiap permintaan perubahan atau *Change Request* dari arsitektur berbasis implementasi dan juga dilakukan di lembaga pemerintahan seperti di kementerian.

METODE

Tahapan – tahapan metode penelitian yang ada disini meliputi :

a.) Studi Literatur

Tujuan dengan metode studi literatur disini adalah untuk mendapatkan ringkasan artikel dari penulis lain dan gambaran tentang memilih tahapan TOGAF ADM dari Arsitektur Enterprise yang cocok untuk pemerintahan desa di kecamatan Muntilan, Magelang.

b.) Penggunaan Tahapan dari TOGAF ADM

Tahapan dari TOGAF ADM yang dipakai pada penelitian disini yaitu *Implementation Governance*, yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan serta sistem di dalam pemerintahan desa dengan harapan bisa untuk mencapai tujuan pemerintahan desa yaitu mensejahterahkan masyarakatnya.

c.) Assessment

Untuk melakukan *asesment* atau sebuah penilaian, yang dibutuhkan pertama adalah observasi pada pemerintahan desa di kecamatan Muntilan, Magelang. Dengan melakukan observasi lapangan atau terjun langsung ke pemerintahan desa di kecamatan Muntilan diperlukan untuk mengetahui apakah diperlukan sebuah penerapan arsitektur enterprise tahapan dari TOGAF ADM yaitu *Implementation Governance* tersebut.

Dan selanjutnya adalah melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yang terkait dalam pemerintahan desa di kecamatan Muntilan, Magelang. Dengan melakukan wawancara secara langsung ke salah satu narasumber, sangat berguna untuk mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan proses pemerintahan desa di kecamatan Muntilan.

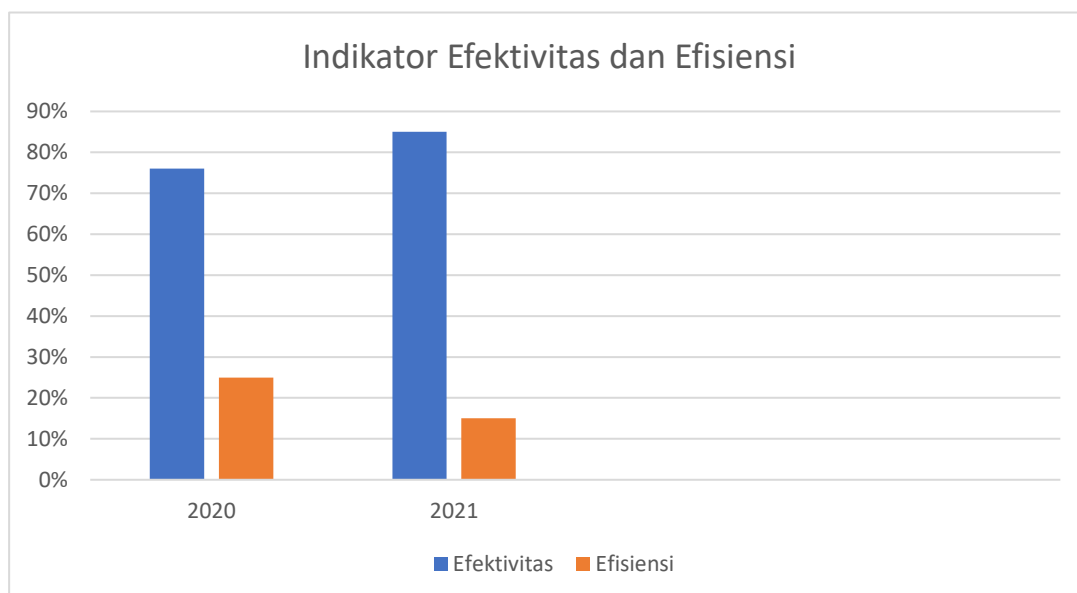
PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance*

Untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu harus memiliki efisiensi dan efektivitas, inovasi, orientasi jangka panjang, keterbukaan dan transparansi, akuntabel dan pengelolaan keuangan yang handal. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut belum sepenuhnya dilakukan, maka harus ada suatu intensitas yang dilakukan pada pemerintahan di kecamatan Muntilan untuk bisa mencapai target dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Akan tetapi pemerintahan desa yang ada pada kecamatan Muntilan sudah bisa dibilang memiliki sebuah sistem pemerintahan yang lebih modern, karena apabila pemerintahan desa tersebut bisa menggunakan salah satu tahapan atau prinsip arsitektur enterprise dari TOGAF ADM yaitu *implementation governance* ini, maka bisa mencapai target menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan pemerintahan desa menjadi lebih baik yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Efisiensi dan Efektivitas

Sebagian besar pemerintahan desa sudah menerapkan prinsip dari efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sebuah keuangannya. Suatu efektivitas bisa diukur dengan perbandingan realisasi pendapatan dari desa tersebut dengan target pendapatan yang telah diterapkan. Untuk tingkat efisiensinya bisa diukur dengan perbandingan biaya pengeluaran dari pendapatan yang diterima. Berikut adalah contoh pengelolaan keuangan yang bisa menjadi prioritas untuk diterapkan :



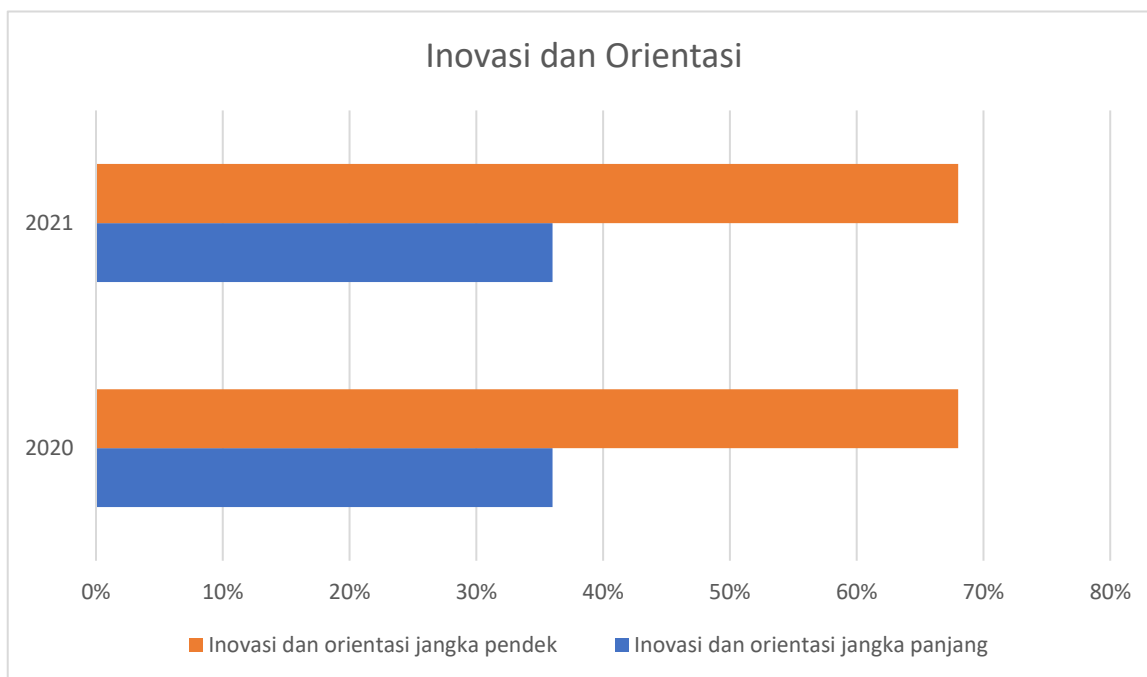
Visi Strategis

Dari setiap organisasi diharuskan strategis dalam menentukan sebuah karakteristiknya, karena di dalam karakteristik tersebut merupakan inti dalam menjalankan suatu operasi untuk menjadikan organisasi yang lebih unggul dibandingkan dengan organisasi lain. Dan sebuah karakteristik tersebut bisa juga meningkatkan reputasi pada organisasi.

Yang dimaksudkan visi strategis dalam sebuah pemerintahan desa adalah agar pemerintahan desa tersebut bisa dilihat dari bagaimana desa bisa memposisikan dirinya. Visi harus sangat bernilai dan terukur, karena bisa mencapai sebuah pencapaian yang dapat di evaluasi.

Inovasi dan Orientasi Jangka Panjang

Agar mempunyai sebuah keunggulan dari suatu organisasi, inovasi jangka panjang juga diperlukan. Disini juga akan digambarkan sebuah contoh indikator terkait dengan penjelasan yang berada pada visi strategis, berikut adalah gambarannya :



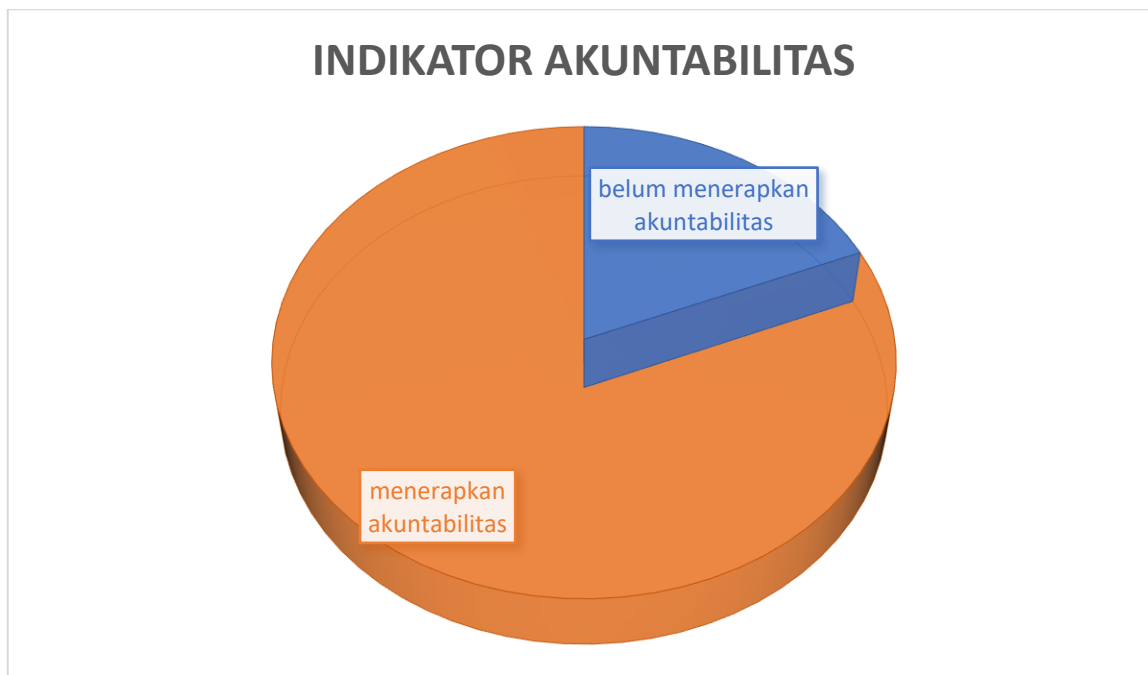
Gambar yang dicontohkan diatas yaitu pada tahun 2020 dan 2021, desa hanya memiliki 32% inovasi dan orientasi jangka panjang. Dari kedua indikator diatas terlihat sebuah keunikan, dampak positif program dan tujuan dari desa dalam pembangunan desa, dikarenakan tidak hanya meniru program yang sama dari desa lain. Apabila dengan adanya tahapan dari arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM yaitu *implementation governance* diharapkan bisa menerapkan contoh indikator diatas untuk menggunakan sebuah inovasi dan orientasi dalam penggunaan dana pada desa di kecamatan Muntilan.

Keterbukaan dan Transparansi

Transparansi yang dimaksudkan disini adalah tentang pengelolaan keuangan daerah dan dapat diukur dengan empat kriteria, yaitu aksesibilitas, ketersediaan, frekuensi dalam pengungkapan dokumen pada pengelolaan keuangan desa dan ketepatan waktu pada keterbukaan informasi. Informasi ini dianggap telah tersedia, apabila dokumen indikator pada setiap tahapan pengelolaan desa telah diperoleh selama ada observasi dan ketersediaan pada pemerintahan desa kecamatan Muntilan. Keterbukaan disini dimaksudkan apabila dokumen tersebut bisa diketahui oleh public, maka informasi akan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.

Akuntabel

Dalam akuntabel disini adalah dapat dilihat dari berbagai prespektif. Dalam akuntabel disini juga memiliki dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab dari lembaga publik atas keuangan yang didapat dari masyarakat ke pemerintah, sedangkan akuntabilitas kebijakan keterkaitan dengan tanggung jawab suatu lembaga publik dari berbagai macam kebijakan serta keputusan yang telah diambil. Dengan penerapan arsitektur enterprise dengan tahapan dari TOGAF ADM yaitu *implementation governance* kemungkinan besar bisa meningkatkan semua tata kelola pada pemerintahan di kecamatan Muntilan. Berikut adalah contoh penerapan akuntabilitas dengan indikator dari 14 desa di kecamatan Muntilan sekitar 81,3% yang telah melakukan penerapan akuntabilitas.



Pengelolaan Keuangan Yang Handal

Kehandalan sebuah pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa dapat diukur dari bagaimana desa bisa menghasilkan pendapatan yang tidak bersumber dari dan desa atau alokasi dana dari kecamatan, kabupatau atau provinsi. Pemerintah desa dapat melakukan berbagai program yang kreatif untuk bisa mendapatkan suatu pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desanya. Dengan melakukan pengadaan BUMDesa pemerintah desa bisa menghasilkan pendapatan yang besar dari salah satu bentuk legalitas pemerintah.

Pada tata kelola keuangan dari 14 desa yang berada di kecamatan Muntilan, hanya sedikit yang menunjukkan kehandalan dalam pengelolaan keuangan sekitar 30% yang memiliki kehandalan dalam pengelolaan keuangan. Berikut adalah gambaran contoh kemungkinan kehandalan dari data yang berada di kecamatan Muntilan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas dan analisis yang ada pada diatas, maka kesimpulan dan sarannya adalah berikut :

1. Secara keseluruhan data pada tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di berbagai desa di kecamatan Muntilan secara umum sudah baik, akan tetapi meskipun dari beberapa indikator belum dilakukan pelaksanaan.
2. Dari beberapa indikator yang belum dilaksanakan dapat dikembangkan serta ditingkatkan kembali dengan menumbuhkan pemikiran kreatif serta krisis yang dapat sangat berguna untuk menentukan dari inovasi, visi strategis dan orientasi jangka panjang.
3. Implementasi *good governance* di berbagai pemerintahan desa yang berada di kecamatan Muntilan sudah baik dan dengan penerapan arsitektur enterprise menggunakan tahapan TOGAF ADM yaitu *implementation governance* bisa dilaksanakan serta diperkuat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Supangat, A. Pratama, and T. Rahmawati, "Implementation of C4.5 Algorithm for Analysis of Service Quality in Companies of PT. XYZ," *Proc. 2nd Int. Conf. Bus. Manag. Technol. (ICONBMT 2020)*, vol. 175, pp. 1–7, 2021, doi: 10.2991/aebmr.k.210510.008.
- [2] Supangat, "Pertemuan keempat - TOGAF." 2020, [Online]. Available: <http://repository.untagsby.ac.id/id/eprint/6048>.

PLAGIARISM SCAN REPORT

Date December 21, 2021

Exclude URL: NO



Unique Content **97%**

Plagiarized Content **3%**

Paraphrased Plagiarism **0**

Word Count 1,463

Records Found 5

CONTENT CHECKED FOR PLAGIARISM:

Penerapan Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Konteks Pemerintahan Desa Di
Kecamatan Muntilan Menggunakan Tahapan Dari TOGAF ADM

ARSITEKTUR ENTERPRISE
(R)

Oleh :

Dovan Edo Aji Pratama

1461900047

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pemerintahan tingkat rendah adalah desa. Penerapan yang digunakan disini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa yang berada di Kecamatan Muntilan, Magelang. Dengan melakukan penerapan tersebut, akan membawa seluruh pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan menjadi lebih baik daripada

sebelumnya. Tata kelola di seluruh pemerintahan desa masih perlu ditingkan agar mencapai dengan tujuan dan ketentuan mensejahterakan para warga desanya. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu dengan efisiensi dan efektivitas, inovasi, orientasi jangka panjang, keterbukaan dan tansparasi, akuntabel dan pengelolaan keuangan yang handal.

Ruang lingkup pemerintahan di desa akan menjadi semakin besar dan kompleks dengan pendekatan tradisional terhadap audit internal dan manajemen resiko yang perlu di optimalkan secara menyeluruh sehingga dapat tetap efektif. Dengan menggunakan salah satu prinsip Enterprise Architecture TOGAF ADM yaitu Implementation Governance, akan menjadi titik awal perkembangan atau peningkatan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan, Magelang. Penerapan secara efektif dapat memberi manfaat untuk mecapai suatu tujuan pemerintahan desa yang telah di musyawarahkan pada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka disini dilakukan untuk mendapatkan sebuah ringkasan artikel dari penulis yang dijadikan pedoman, yaitu menggunakan studi literatur. Disini juga akan dijelaskan mengenai suatu metode dasar berkaitan dengan topik yang akan dikerjakan.

Penerapan salah satu tahapan Enterprise Architecture TOGAF ADM yaitu menggunakan Implementation Governance dilakukan untuk meningkatkan dan menerapkan sebuah prinsip- prinsip pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan, Magelang. Peningkatan dan penerapan sebuah prinsip-prinsip tersebut meliputi manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan, manajemen pelayanan, manajemen kemasyarakatan, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen kewilayahan, manajemen legalisasi dan manajemen sarana prasarana. Studi literatur dilakukan untuk mendapat sebuah ringkasan artikel yang dijadikan pedoman. Studi literatur yang dimaksud meliputi penulis artikel, judul artikel, hasil dari penelitian serta persamaan dan perbedaan dari artikel yang menjadi referensi.

Artikel yang menjadi referensi disini, yaitu [1] Implementation of C4.5 Algorithm for Analysis of Service Quality in Companies of PT. XYZ dengan hasil penelitian (PT. Kualitas pelayanan XYZ kepada pelanggan dengan menggunakan metode C4.5, level PT. Pelayanan XYZ dapat diukur dengan jelas dan aspek ruang tunggu merupakan aspek yang paling dominan dari beberapa aspek kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. XYZ.) dan dari dalam artikel tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dari yang telah saya buat yaitu persamaanya adalah memiliki kasus yang sama-sama menggunakan implementasi untuk meningkatkan suatu pelayanan pemerintahan maupun perusahaan, perbedaan dari artikel tersebut adalah menggunakan algoritma C4. 5

sedangkan disini menggunakan tahapan TOGAF ADM yaitu Implementation Governance.

[2] Pertemuan Keempat – TOGAF dengan hasil penelitian yaitu (Pengertian serta penjelasan tentang TOGAF, kelebihan dan kekurangan TOGAF, dan penjelasan dengan metode ADM) dari dalam artikel tersebut saya mengambil bagian tentang fase yang berada di TOGAF yaitu Implementation Governance. Dengan penerapan Implementation Governance di bidang pemerintahan merupakan sebuah kecocokan tersendiri dikarenakan bisa menjadi solusi dari setiap permintaan perubahan atau Change Request dari arsitektur berbasis implementasi dan juga dilakukan di lembaga pemerintahan seperti di kementerian.

METODE

Tahapan – tahapan metode penelitian yang ada disini meliputi :

a.) Studi Literatur

Tujuan dengan metode studi literatur disini adalah untuk mendapatkan ringkasan artikel dari penulis lain dan gambaran tentang memilih tahapan TOGAF ADM dari Arsitektur Enterprise yang cocok untuk pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan, Magelang.

b.) Penggunaan Tahapan dari TOGAF ADM

Tahapan dari TOGAF ADM yang dipakai pada penelitian disini yaitu Implementation Governance, yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan serta sistem di dalam pemerintahan desa dengan harapan bisa untuk mencapai tujuan pemerintahan desa yaitu mensejahterahkan masyarakatnya.

c.) Assessment

Untuk melakukan assessment atau sebuah penilaian, yang dibutuhkan pertama adalah observasi pada pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan, Magelang. Dengan melakukan observasi lapangan atau terjun langsung ke pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan diperlukan untuk mengetahui apakah diperlukan sebuah penerapan arsitektur enterprise tahapan dari TOGAF ADM yaitu Implementation Governance tersebut. Dan selanjutnya adalah melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yang terkait dalam pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan, Magelang. Dengan melakukan wawancara secara langsung ke salah satu narasumber, sangat berguna untuk mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan proses pemerintahan desa di Kecamatan Muntilan.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance

Untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu harus memiliki efisiensi dan efektivitas, inovasi, orientasi jangka panjang, keterbukaan dan transparansi, akuntabel dan pengelolaan keuangan yang handal. Prinsip-prinsip good governance tersebut belum sepenuhnya dilakukan, maka harus ada suatu intensitas yang dilakukan pada pemerintahan di Kecamatan Muntilan untuk bisa mencapai target dari penerapan prinsip-prinsip good governance. Akan tetapi pemerintahan desa yang ada pada Kecamatan Muntilan sudah bisa dibilang memiliki sebuah sistem pemerintahan yang lebih modern, karena apabila pemerintahan desa tersebut bisa menggunakan salah satu tahapan atau prinsip arsitektur enterprise dari TOGAF ADM yaitu implementation governance ini, maka bisa mencapai target menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pemerintahan desa bisa menjadi lebih baik yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Efisiensi dan Efektivitas

Sebagian besar pemerintahan desa sudah menerapkan prinsip dari efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sebuah keuangannya. Suatu efektivitas bisa diukur dengan perbandingan realisasi pendapatan dari desa tersebut dengan target pendapatan yang telah diterapkan. Untuk tingkat efisiensinya bisa diukur dengan perbandingan biaya pengeluaran dari pendapatan yang diterima. Berikut adalah contoh pengelolaan keuangan yang bisa menjadi prioritas untuk diterapkan :

Visi Strategis

Dari setiap organisasi diharuskan strategis dalam menentukan sebuah karakteristiknya, karena di dalam karakteristik tersebut merupakan inti dalam menjalankan suatu operasi untuk menjadikan organisasi yang lebih unggul dibandingkan dengan organisasi lain. Dan sebuah karakteristik tersebut bisa juga meningkatkan reputasi pada organisasi.

Yang dimaksudkan visi strategis dalam sebuah pemerintahan desa adalah agar pemerintahan desa tersebut bisa dilihat dari bagaimana desa bisa memposisikan dirinya. Visi harus sangat bernilai dan terukur, karena bisa mencapai sebuah pencapaian yang dapat di evaluasi.

Inovasi dan Orientasi Jangka Panjang

Agar mempunyai sebuah keunggulan dari suatu organisasi, inovasi jangka panjang juga diperlukan. Disini juga akan digambarkan sebuah contoh indikator terkait dengan penjelasan yang berada pada visi strategis, berikut adalah gambarannya :

Gambar yang dicontohkan diatas yaitu pada tahun 2020 dan 2021, desa hanya memiliki 32% inovasi dan orientasi jangka panjang. Dari kedua indikator diatas terlihat sebuah keunikan, dampak positif program dan tujuan dari desa dalam pembangunan desa, dikarenakan tidak hanya meniru program yang sama dari desa lain. Apabila dengan adanya tahapan dari arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM yaitu implementation governance diharapkan bisa menerapkan contoh indikator diatas untuk menggunakan sebuah inovasi dan orientasi dalam penggunaan dana pada desa di Kecamatan Muntilan.

Keterbukaan dan Transparansi

Transparansi yang dimaksudkan disini adalah tentang pengelolaan keuangan daerah dan dapat diukur dengan empat kriteria, yaitu aksesibilitas, ketersediaan, frekuensi dalam pengungkapan dokumen pada pengelolaan keuangan desa dan ketepatan waktu pada keterbukaan informasi. Informasi ini dianggap telah tersedia, apabila dokumen indikator pada setiap tahapan pengelolaan desa telah diperoleh selama ada observasi dan ketersediaan pada pemerintahan desa Kecamatan Muntilan. Keterbukaan disini dimaksudkan apabila dokumen tersebut bisa diketahui oleh public, maka informasi akan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.

Akuntabel

Dalam akuntabel disini adalah dapat dilihat dari berbagai prespektif. Dalam akuntabel disini juga memiliki dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab dari lembaga publik atas keuangan yang didapat dari masyarakat ke pemerintah, sedangkan akuntabilitas kebijakan keterkaitan dengan tanggung jawab suatu lembaga publik dari berbagai macam kebijakan serta keputusan yang telah diambil. Dengan penerapan arsitektur enterprise dengan tahapan dari TOGAF ADM yaitu implementation governance kemungkinan besar bisa meningkatkan semua tata kelola pada pemerintahan di kecamatan Muntilan. Berikut adalah contoh penerapan akuntabilitas dengan indikator dari 14 desa di kecamatan Muntilan sekitar 81,3% yang telah melakukan penerapan akuntabilitas.

Pengelolaan Keuangan Yang Handal

Kehandalan sebuah pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa dapat diukur dari bagaiman desa bisa menghasilkan pendapatan yang tidak bersumber dari dan desa atau alokasi dana dari kecamatan, kabupatau atau provinsi. Pemerintah desa dapat melakukan berbagai program yang kreatif untuk bisa mendapatkan suatu pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desanya. Dengan melakukan pengadaan BUMDesa pemerintah desa bisa menghasilkan pendapatan yang besar dari salah satu bentuk legalitas pemerintah.

Pada tata kelola keuangan dari 14 desa yang berada di kecamatan Muntilan, hanya sedikit yang menunjukkan kehandalan dalam pengelolaan keuangan sekitar 30% yang memiliki kehandalan dalam pengelolaan keuangan. Berikut adalah gambaran contoh kemungkinan kehandalan dari data yang berada di kecamatan Muntilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas dan analisis yang ada pada diatas, maka kesimpulan dan sarannya adalah berikut :

1. Secara keseluruhan data pada tingkat penerapan prinsip-prinsip good governance di berbagai desa di kecamatan Muntilan secara umum sudah baik, akan tetapi meskipun dari beberapa indikator belum dilakukan pelaksanaan.
2. Dari beberapa indikator yang belum dilaksanakan dapat dikembangkan serta ditingkatkan kembali dengan menumbuhkan pemikiran kreatif serta krisis yang dapat sangat berguna untuk menentukan dari inovasi, visi strategis dan orientasi jangka panjang.
3. Implementasi good governance di berbagai pemerintahan desa yang berada di kecamatan Muntilan sudah baik dan dengan penerapan arsitektur enterprise menggunakan tahapan TOGAF ADM yaitu implementation governance bisa dilaksanakan serta diperkuat kembali.

MATCHED SOURCES:

[accurate.id](#) - *1% Similar* Compare

<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-perencana...>

[www.timesindonesia.co.id](#) - *<1>Compare*

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/336354/gus-menter...>

[teknik.umk.ac.id](#) - *<1>Compare*

https://teknik.umk.ac.id/files/data_teknik_jama/RPKPS TI/R...

repository.untag-sby.ac.id - *<I>Compare*

<http://repository.untag-sby.ac.id/186/2/BAB I.pdf>

www.bpkp.go.id - *<I>Compare*

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Si...